

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sektor pariwisata yang dirancang secara terarah, menyeluruh, berkesinambungan, dan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan tersebut harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, termasuk aspek budaya, kepercayaan, pelestarian lingkungan, kualitas hidup, serta memperhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi kekayaan alam, keanekaragaman hayati, warisan sejarah, serta karya seni yang dimiliki, sektor pariwisata memiliki peran strategis sebagai aset pembangunan. Keberadaannya dapat mendorong peningkatan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat, sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata diartikan sebagai serangkaian aktivitas perjalanan yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan pelayanan, yang diselenggarakan oleh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah pusat dan daerah. Seiring dengan munculnya tren baru di kalangan pelancong modern, konsep wisata alternatif hadir sebagai pendekatan berbasis alam yang melibatkan peran aktif masyarakat lokal. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.

Pengembangan desa wisata di Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah setelah banyaknya fenomena desa tertinggal yang kurang diperhatikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata yang berpusat pada desa wisata akan menghidupkan kegiatan ekonomi terkait pariwisata, sehingga dapat mengurangi urbanisasi dari daerah pedesaan ke pusat kota. Desa Wisata adalah sebuah wilayah

pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata (Zakaria & Suprihardjo, 2014).

Dengan kekayaan bentang alam dan adat istiadat yang dimiliki oleh Indonesia, tercatat jumlah desa dari sabang hingga merauke pada tahun 2023 adalah 83.971 desa yang secara umum memiliki daya tarik masing-masing dan butuh dikembangkan. Tentunya dengan keindahan alam dan budayanya, hal tersebut menjadi sebuah potensi dalam pengembangan sebagai desa wisata. Berdasarkan data yang merangkum desa wisata dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024, dapat disimpulkan bahwa saat ini Indonesia memiliki 6.016 desa wisata di seluruh provinsi di Indonesia yang saling berkolaborasi dan berkompetisi untuk menampilkan wajah terbaik dari desa wisata versi masing-masing. Adanya kegiatan tersebut sangat membantu peningkatan pertumbuhan dalam desa wisata yang ada di Indonesia dengan cepat dan memunculkan banyaknya desa wisata baru.

Pada dasarnya pembangunan tidak hanya merupakan kenyataan fisik tetapi juga tekad para masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui berbagai proses sosial, ekonomi dan institusional. Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa proses pembangunan masyarakat seharusnya mengarah pada tiga sasaran utama. Pertama, memperluas akses terhadap barang-barang kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan layanan kesehatan. Kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penciptaan kesempatan kerja. Ketiga, mendorong kemandirian sosial dan ekonomi dengan cara mengurangi ketergantungan, sehingga individu memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan arah hidupnya.

Menurut Siagian (1994), pembangunan merupakan serangkaian langkah yang dirancang secara sadar dan sistematis guna mendorong pertumbuhan dan transformasi dalam suatu bangsa, negara, maupun pemerintahan. Kolaborasi antara pemerintah, negara, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan diyakini mampu memberikan kontribusi positif, salah satunya terhadap pengembangan wilayah pedesaan melalui konsep desa wisata. Tujuan utama dari pembangunan desa wisata adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat serta memperbaiki kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Namun demikian, tidak sedikit desa wisata yang telah dibentuk belum mampu menunjukkan pengelolaan yang optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti minimnya infrastruktur dan aksesibilitas, kurangnya kesiapan tenaga kerja lokal, rendahnya penguasaan keterampilan di sektor pariwisata, serta terbatasnya jejaring kemitraan yang dimiliki oleh desa.

Pembangunan desa wisata sendiri merupakan salah satu program yang perlu diperhatikan oleh pemerintah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan pemerintah daerah termasuk kewenangan dalam mengelola kepariwisataan di daerah. Adapun teknis pelaksanaannya diatur lebih rinci dalam peraturan daerah. Pembangunan tersebut dalam menjadi sebuah program dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan secara kolaboratif dan terstruktur oleh semua elemen, termasuk masyarakat, pemerintah, sektor swasta, untuk meningkatkan taraf hidup, penghasilan, produktivitas, serta kualitas hidup masyarakat yang ada di desa. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan di tingkat desa melalui berbagai inisiatif program kerja dapat dipahami sebagai bentuk upaya strategis dari pemerintah dalam menggali dan memaksimalkan potensi lokal. Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan nyata yang hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. (Kurniawan & dkk, 2023).

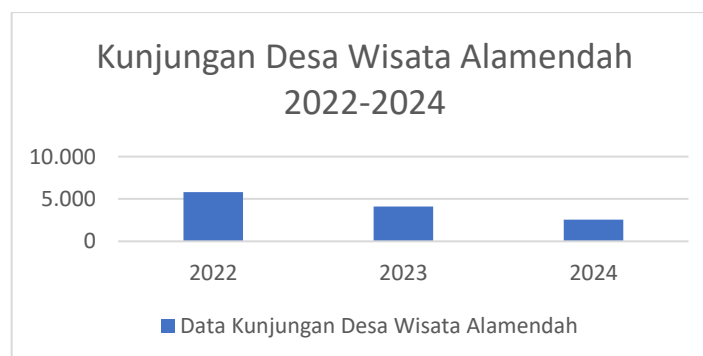
Untuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bandung memiliki rencana dalam program pengembangan 100 desa wisata yang dilihat berdasarkan hasil survey dan kajian. Bupati Bandung memiliki semangat optimis dalam penyampaian dan menambahkan bahwa Kabupaten Bandung sudah menetapkan 50 desa wisata rintasan dalam mendorong kearifan lokal. Merujuk pada hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung memiliki kewenangan pada pengelolaan dan pengembangan desa wisata untuk pengaturan kegiatan suatu usaha yang berkaitan dengan pariwisata. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 Tentang “Pengelolaan dan Pengembangan Desa Wisata menjelaskan bahwa pariwisata merupakan sebuah sektor penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat

berdampak dan berkaitan pada perekonomian masyarakat secara langsung maupun tak langsung” (Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, 2020).

Kapasitas produktif masyarakat lokal dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan suatu instrument bidang sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan. Desa Wisata adalah wilayah pedesaan yang memberikan perspektif komprehensif tentang kehidupan pedesaan termasuk ekonomi, adat istiadat, sosial-budaya, kehidupan sehari-hari, dan kegiatan ekonomi yang menarik. Atas hal tersebut, desa wisata tentunya memiliki berbagai potensi untuk dikembangkan dalam kegiatan pariwisata (Fanceli, N., & Muhammad, 2005).

Kabupaten Bandung termasuk dalam salah satu Kabupaten yang wilayahnya terletak di Provinsi Jawa Barat dan memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat terutama melalui sektor pariwisata. Salah satu desa yang ada di Kabupaten Bandung yaitu Desa Alamendah, Desa ini memiliki sumberdaya alam wisata pegunungan yang sangat indah dan memikat bagi para wisatawan. Desa Alamendah menyuguhkan beragam destinasi wisata menarik yang dapat dikunjungi seperti wisata alam, wisata religi dan agrowisatanya. Dalam tiap obyek wisata di Desa Alamendah terdapat banyaknya UMKM yang menjajakan produk-produk hasil masyarakat lokal. Beberapa obyek wisata di Desa Alamendah diantaranya: trekking, *outbond*, STEM (*Science Technology Engineering Mathematics*) Alamendah, *Virtual Tour*, wisata pertanian, wisata peternakan, wisata kemah, wisata edukasi pembuatan olahan makanan dan souvenir UMKM, pencak silat dan wisata budaya lainnya.

Gambar 1.1 Kunjungan Desa Wisata Alamendah



Sumber: Diolah Peneliti

Melihat pada gambar diatas, data kunjungan Desa Wisata Alamendah mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023 sebesar 4.094 pengunjung dan tahun 2024 sebesar 2.571 pengunjung. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat besar dikarenakan desa wisata seharusnya menjadi karakter khusus yang dapat menarik wisatawan.

Setiap desa umumnya menetapkan visi dan misi sebagai panduan strategis dalam merancang arah perubahan dan kemajuan wilayahnya. Desa Alamendah, misalnya, berkomitmen untuk mendorong kemajuan desa melalui peningkatan sektor ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, yang diiringi dengan semangat kepedulian sosial warga. Upaya pembangunan yang dilakukan mencakup berbagai bidang dengan mengedepankan nilai-nilai religius, budaya, dan kearifan lokal sebagai fondasinya. Adapun misi yang diusung oleh Desa Alamendah tercermin dalam delapan poin visi yang menjadi arah kebijakannya, yaitu;

1. Mengoptimalkan mutu layanan yang bersifat profesional kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Peningkatan dan percepatan ekonomi masyarakat
3. Mengalokasikan gaji kepala desa selama enam tahun ke depan sebagai modal untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat desa.
4. Membangun objek wisata di desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Mengembangkan destinasi wisata lokal sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan desa dan memperkuat kesejahteraan sosial ekonomi warga.
6. Menyediakan beragam peluang wirausaha yang inovatif bagi generasi muda, khususnya kalangan milenial. Memaksimalkan pembangunan di segala bidang
7. Membuka akses terhadap lapangan kerja baru yang dirancang khusus untuk memberdayakan pemuda desa.
8. Mengintensifkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

9. Menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh warga dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, serta tanggung jawab dalam setiap kebijakan.

Berdasarkan misi yang dimiliki oleh Desa Alamendah, beberapa dari misi tersebut berkaitan dengan penelitian ini yaitu, peningkatan dan percepatan ekonomi masyarakat, dan memiliki objek wisata desa untuk peningkatan pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Desa Alamendah menawarkan konsep wisata terpadu yang mampu menarik minat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Perkembangan sektor pariwisata di desa ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, hingga akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai Desa Wisata melalui Keputusan Bupati Bandung No. 556.42/kep.71-DISBUDPAR/2011 pada tanggal 2 Februari 2011. Dalam konteks pembangunan wilayah, Desa Alamendah juga memperoleh penghargaan sebagai salah satu penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021. Pertumbuhan destinasi wisata serta pelaku UMKM di desa ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Capaian tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yang menegaskan bahwa pengembangan desa wisata berperan dalam mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi pariwisata yang dimiliki.

Gambar 1.2 Pendapatan Desa Wisata Alamendah



Sumber: Diolah Peneliti

Melihat pada gambar tersebut, pendapatan bersih Desa Wisata Alamendah tidak stabil dengan adanya kenaikan pada tahun 2023 sebesar Rp 204.000.000 dan penurunan kembali pada tahun 2024 sebesar Rp 157.197.760.

Guna mengendalikan serta meningkatkan kesadaran masyarakat serta elemen terikat dalam penyelenggaraan pariwisata pedesaan di Kabupaten Bandung membutuhkan peran aktif pemerintah dalam membina dan mengawasi seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dalam sektor tersebut demi mengoptimalkan berjalannya program. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menetapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa.

Tujuan adanya pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Bandung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Desa, adalah:

- a. Mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat desa dengan menciptakan kesempatan kerja dan membuka peluang usaha baru, sekaligus memperluas pengembangan terhadap sektor usaha dan layanan yang telah berjalan sebelumnya.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi alam secara produktif, serta melindungi warisan budaya, tradisi, dan arsitektur lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.
- c. Membangun kesadaran kolektif warga dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati, khususnya flora dan fauna khas, serta menjaga keseimbangan ekosistem alam sekitar.
- d. Mengajak masyarakat untuk aktif menciptakan tatanan lingkungan desa yang bersih, tertata, dan mendukung kesehatan bersama.
- e. Mempercepat proses pembentukan sikap positif dan keterampilan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai sapta pesona dalam pariwisata nasional.
- f. Menumbuhkan rasa bangga warga terhadap kekayaan alam, kearifan budaya, dan lingkungan desa sebagai identitas lokal yang bernilai.

Berdasarkan peraturan Bupati Bandung tersebut, pelaksanaan tugas di bidang pariwisata yang dimaksud termasuk pada pengembangan sarana dan objek wisata Alamendah yang dinilai memiliki potensi wisata. pengembangan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan adanya kesadaran masyarakat dalam mengembangkan potensi alamnya secara berkelanjutan.

Pembangunan desa wisata tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang memadai. Selain itu, biaya promosi pariwisata harus mencakup tidak hanya objek wisata tertentu, tetapi juga aspek budaya, pertanian, peternakan, dan sejarah. Bahkan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang signifikan di sektor wisata kuliner untuk memasarkan produk mereka. Menurut Edward dalam Widodo (2007), komunikasi merupakan salah satu faktor krusial dalam implementasi kebijakan karena keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi kebijakan dapat disampaikan dengan jelas, konsisten dan dipahami oleh para pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok yang dituju. Apabila tidak berjalan efektif maka dapat menimbulkan perbedaan dalam pemahaman antar pelaksana maupun sasaran kebijakan.

Hal ini tercermin dalam implementasi kebijakan Desa Wisata Alamendah, di mana masih terdapat hambatan komunikasi antara pemerintah desa, pengelola wisata dan masyarakat yang terlibat terkait informasi arah kebijakan serta program pembangunan desa yang belum sebelumnya dipahami secara merata, sehingga memunculkan keterbatasan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program. Kondisi tersebut menegaskan bahwa lemahnya dimensi komunikasi menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas implementasi kebijakan di Desa Wisata Alamendah.

Dalam pandangan Edward yang dikutip oleh Widodo (2010), struktur birokrasi yang jelas dan sederhana sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sebaliknya, birokrasi yang kaku dan berlapis-lapis dapat menghambat jalannya program. Di Desa Wisata Alamendah, mekanisme birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan desa wisata masih dihadapkan pada koordinasi yang belum

sinergis. Hal ini menimbulkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan serta kurang optimalnya sinkronisasi antar pihak terkait.

Indikasi-indikasi yang memperlihatkan belum efektifnya pengembangan Desa Wisata Alamendah Kabupaten Bandung antara lain:

1. Kegiatan Desa Wisata Alamendah belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya secara signifikan
2. Kurangnya fasilitasi dan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata oleh pemerintah daerah
3. Kurangnya kerjasama antara pengelola desa, pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pengembangan desa
4. Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk turut mengembangkan Desa Wisata Alamendah.

Permasalahan terkait pelaksanaan kebijakan kerap menjadi isu menarik, baik di negara-negara maju maupun berkembang. Pada dasarnya, kebijakan dirancang untuk menghasilkan kondisi yang optimal dan ideal. Kondisi tersebut merujuk pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Sejalan dengan Marshall (2003), ia meyakini bahwa kebijakan pemerintah berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, melalui penyediaan layanan sosial dan bantuan keuangan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, menduga belum optimalnya implementasi kebijakan desa yang diterapkan oleh Desa Alamendah. Oleh karena itu, diperlukannya analisis terkait peran pemerintah daerah dalam mendorong efektivitas pengembangan desa di Desa Wisata Alamendah. Analisis tersebut akan memberikan gambaran sejauh mana desa alamendah dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah.

Maka dari permasalahan tersebut, muncul ketertarikan dalam membahas topik mengenai keterkaitan implementasi kebijakan desa wisata dengan efektivitas pengembangan desa di Kabupaten Bandung khususnya di Desa Alamendah Kecamatan Rancabali yang merupakan desa wisata kategori maju, adapun judul

yang penulis angkat yaitu **“PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA WISATA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN DESA DI DESA ALAMENDAH KABUPATEN BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat ditentukan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yakni seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan (X) desa wisata terhadap Efektivitas Pembangunan Desa (Y).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk mengukur dan mengidentifikasi pengaruh implementasi kebijakan desa wisata terhadap efektivitas pembangunan desa di Desa Alamendah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan, pengetahuan, dan referensi yang berharga bagi peneliti di bidang administrasi publik, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan dan efektivitas pembangunan desa di Desa Alamendah.
2. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Desa Alamendah dan Para Pengelola Desa Wisata Alamendah pada pembangunan desa di Desa Wisata Alamendah.

2. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini merupakan wujud dari penerapan ilmu yang telah dipelajari selama menjadi mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UIN Sunan Gunung Djati Bandung bagi peneliti. Selain itu, penelitian ini menjadi landasan teori yang telah diteliti melalui penelitian lapangan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan evaluasi yang berharga untuk masa

yang akan datang dalam perumusan atau pengelolaan kebijakan pengelolaan serta pengembangan desa wisata.

2. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam pembangunan desa dan pada perumusan kebijakannya agar sesuai dengan harapan masyarakat dan kebutuhan desa.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini membahas topik mengenai Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pembangunan Desa di Desa Alamendah. Untuk mengukur bahwa implementasi kebijakan desa wisata menjadi sebuah pengaruh dalam efektivitas pembangunan desa, maka indikator sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini harus disesuaikan dengan topik terkait pengaruh kebijakan desa wisata.

Implementasi kebijakan adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku kebijakan dengan harapan bahwa penyelenggara kebijakan akan memberikan hasil yang sesuai dengan tujuan proses pembuatan kebijakan (Anggara, 2018). Para ahli telah memberikan beberapa banyak model implementasi kebijakan untuk memberikan wawasan yang berbeda tentang aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Penelitian ini berfokus pada teori yang digunakan dalam implementasi kebijakan oleh Edwards III dalam Widodo (2021), yaitu:

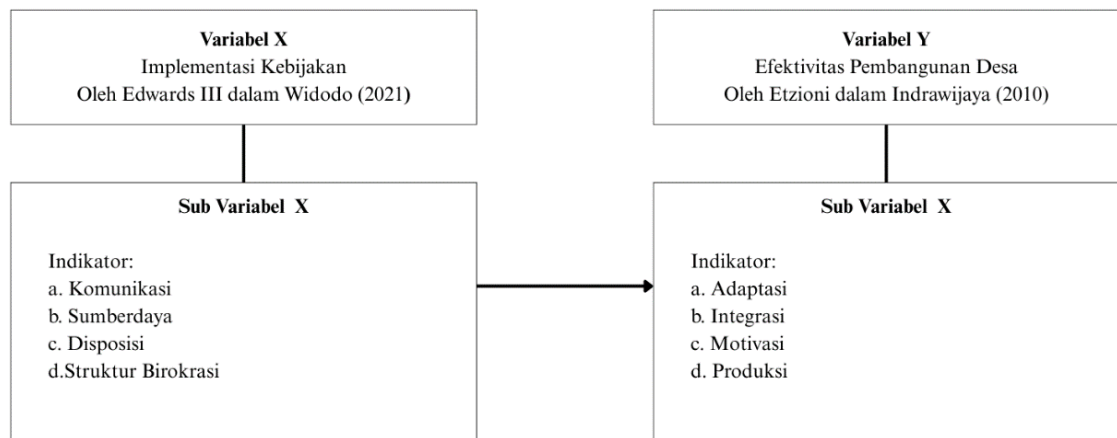
- a. Komunikasi (Communication): Dalam pelaksanaan kebijakan publik, proses penyampaian informasi dari pihak pembuat kebijakan kepada pelaksana memiliki peran yang sangat penting. Penyebarluasan informasi terkait substansi kebijakan, tujuannya, arah kebijakan, serta kelompok sasarannya menjadi hal yang esensial agar para pelaksana memiliki pemahaman yang utuh. Dengan pemahaman tersebut, pelaksana kebijakan dapat menyiapkan langkah-langkah yang tepat dalam menjalankan kebijakan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

- b. Sumberdaya, hal ini memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan sebagaimana Edward III dalam Widodo (2021;98) menyatakan kejelasan dan kekonsistennannya ketentuan-ketentuan, serta akuratnya penyampaian ketentuan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan terdapat kekurangan sumber daya untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif, kebijakan tidak akan terimplementasi secara optimal. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (seperti gedung, peralatan, lahan, dll.) yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, serta sumber daya informasi dan wewenang.
- c. Disposisi, merupakan sikap, kemauan, dan dorongan dari para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara konsisten dan bersungguh-sungguh demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Para pelaku kebijakan akan mengetahui apakah kebijakan yang dilakukannya akan menguntungkan ataupun tidak, manakala mereka memiliki pengetahuan (*cognitive*) yang cukup, pendalaman (*comprehension*) serta pemahaman (*understanding*) kebijakan yang baik. Kurangnya pendalaman dalam disposisi ini akan menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi mencakup elemen-elemen penting seperti konfigurasi organisasi, pembagian tanggung jawab, koordinasi antar unit yang saling berhubungan, serta interaksi dengan pihak eksternal. Dalam konteks implementasi kebijakan, struktur ini memiliki dua komponen utama, yaitu fragmentasi dan prosedur operasional standar. Kedua dimensi tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk menyederhanakan serta menyeragamkan tindakan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara konsisten.

Penjelasan diatas terkait implementasi kebijakan tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap efektivitas pembangunan desa di Desa Alamendah. Penelitian ini akan menggunakan variabel efektivitas pembangunan desa dari Etzioni yang dikutip oleh Indrawijaya (2010) yang terdiri dari empat dimensi yaitu adaptasi, integrasi, motivasi dan produksi.

- a. Dimensi Adaptasi, merupakan persoalan kemampuan pelaksana program untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan menekan pada dua tolak ukur yaitu proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut. Hal ini akan menunjukkan seberapa jauh kemanfaatan organisasi terhadap lingkungan yang ditempati.
- b. Dimensi Integrasi, merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas terhadap tingkat kemampuan pelaksana program dalam melakukan sosialisasi, mengembangkan konsensus serta berbagai bentuk koordinasi dan komunikasi lainnya.
- c. Dimensi Motivasi, merupakan pendekatan yang mengukur tingkat efektivitas mengenai kelengkapan sarana dalam pelaksanaan program termasuk hubungan perilaku pelaksana program dan kelengkapan sarana bagi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi program yang dibentuk dalam sifat tanggungjawab dan kedisiplinan.
- d. Dimensi Produksi, Dimensi ini menilai efektivitas pelaksanaan program melalui pendekatan yang mengaitkan intensitas aktivitas dengan volume dan kualitas hasil yang dihasilkan. Fokus utamanya adalah pada pencapaian target yang telah ditetapkan serta perbandingannya dengan hasil nyata yang berhasil direalisasikan.

Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran



(Kerangka Pemikiran: Diolah Peneliti)

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan dugaan awal yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan penelitian dan biasanya disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian. Disebut sebagai dugaan sementara karena jawaban yang diberikan masih bersifat teoritis, mengacu pada landasan teori yang relevan, dan belum didukung oleh temuan empiris yang diperoleh dari proses pengumpulan data secara sistematis.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menguji hipotesis sebagai berikut:

- $H_0 : p = 0$: Tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pembangunan Desa di Desa Wisata Alamendah Kabupaten Bandung.
- $H_a : p \neq 0$: Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Pembangunan Desa di Desa Wisata Alamendah Kabupaten Bandung.